

Pertemuan Strategis Bupati Buteng Azhari - Gubernur Sultra ASR Bahas Arah Pembangunan Buteng



Laporan: Noval, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, BP- Komunikasi antarpemerintah yang berbasis data dan argumentasi rasional menjadi kunci lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal itu ditegaskan Bupati Buton Tengah, Azhari, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Yusran Fahim Lantik Pejabat Baru, Wali Kota Baubau: Hilangkan Ego Sektoral, Perkuat Kolaborasi

Laporan: Firman

BAUBAU, DT-Pemerintah Kota Baubau melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat di lingkup Pemkot Baubau yang berlangsung dengan khidmat, Senin (23/1/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE.



Walikota Baubau
H Yusran Fahim SE

Menurut Azhari, setiap diskusi dengan pimpinan daerah tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus membawa substansi yang kuat demi kepentingan masyarakat luas.

Lanjut ke Hal: 7

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai aturan turunannya. Dalam perda tersebut, sejumlah OPD

Lanjut ke Hal: 7

Ini Dia Nama 25 Pejabat Pemkot Baubau Yang Dilantik Walikota HYF, 3 OPD Masih Kosong



Laporan: Firman

BAUBAU, DT-Pemerintah Kota Baubau melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 25 pejabat struktural dan fung-

sional di lingkungan Pemkot Baubau. Pelantikan tersebut meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat eselon IV yang di gelar di gedung Aula Kan-

tor Walikota Palagimata Kota Baubau, Sulawesi Tenggara(Sultra), pada hari Jumat (23/1/2026).

Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan

Lanjut ke Hal: 7

Menag RI Nasaruddin Umar Terharu dan Kaget Terima Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menerima penganugerahan gelar kehormatan adat dari Kesultanan Buton dalam sebuah prosesi adat yang digelar di Baruga Masjid Agung Keraton Buton, Kamis (8/1/2026) lalu..

Penganugerahan tersebut merupakan hasil keputusan musyawarah adat Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buton. Keputusan itu ditetapkan dan ditandatangi langsung oleh Sultan Buton Paduka Yang Mulia Drs. La Ode Muh. Kariu.

Keputusan penganugerahan gelar tersebut dibacakan secara resmi oleh Bontoogeno Matanaeyo Maa Faizi Drs. H. Masri,



M.Pd., di hadapan tamu undangan dan perangkat adat yang hadir dalam prosesi tersebut.

Melalui keputusan itu, Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. secara adat dinyatakan sebagai bagian dari kerabat sekaligus sesepuh

dalam lingkungan Kesultanan Buton.

Dalam sambutannya, Nasaruddin Umar mengaku terkejut dan merasa tidak menyangka akan menerima gelar kehormatan adat yang menurutnya

Lanjut ke Hal: 7

Feature News

Pemkab Buton Akan Percepat Perbaikan Pasar Kaloko Pascakerusakan, Bupati Alvin Akawijaya Komitmen Akan Dirikan Bangunan Lebih Tahan Hadapi Cuaca Ekstrem



PEMERINTAH Kabupaten Buton akan mempercepat langkah perbaikan Pasar Kaloko di Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo, setelah sebagian bangunan pasar tersebut mengalami kerusakan akibat angin kencang pada Kamis, 15 Januari 2026. Upaya ini diproyeksikan menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi masyarakat setempat.

Oleh : Mashuri

Ke depan, perbaikan pasar akan ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Pasar Kaloko dipandang memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas

ekonomi yang menopang kehidupan para pedagang dan masyarakat sekitar.

Komitmen percepatan perbaikan ini disampaikan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Pu-

tra, SH, usai melakukan peninjauan lapangan pada Jumat, 16 Januari 2026. Dari hasil kunjungan tersebut, pemerintah daerah akan menyusun langkah-langkah teknis yang lebih terarah.

Bupati menegaskan bahwa proses perbaikan tidak hanya akan difokuskan pada pemulihan fisik bangunan, tetapi juga pada peningkatan kualitas konstruksi agar lebih aman dan tahan terhadap cuaca ekstrem di masa mendatang.

Lanjut ke Hal: 7

Pertemuan Strategis Bupati Buteng Azhari - Gubernur Sultra ASR Bahas Arah Pembangunan Buteng

"Diskusi harus membawa data dan logika yang baik. Bukan hanya untuk menyenangkan pimpinan, tetapi demi kepentingan bersama dan kemajuan daerah kita, Sulawesi Tenggara," tegasnya.

Pandangan tersebut mengemuka setelah Azhari melakukan pertemuan langsung dengan Gubernur Sultra di ruang kerja gubernur. Pertemuan itu berlangsung hampir dua jam dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka.

Dalam pertemuan tersebut, Azhari memaparkan berbagai rencana strategis pembangunan Kabupaten Buteng Tengah yang disusun berdasarkan potensi daerah serta kebutuhan jangka panjang masyarakat.

"Kami berdiskusi cukup lama. Saya menjelaskan apa saja

yang sedang dan akan kami rencanakan di Buteng Tengah. Alhamdulillah, Bapak Gubernur mendengar dengan sangat baik dan memberikan banyak masukan," ujar Azhari.

Beberapa sektor prioritas yang dibahas meliputi pengembangan pendidikan melalui rencana kehadiran Kampus B Universitas Sembilanbelas November (USN) di Buteng Tengah, penguatan sektor pariwisata, serta pengembangan budidaya lobster sebagai komoditas unggulan sektor kelautan.

Azhari mengungkapkan, Gubernur Sultra menunjukkan ketertarikan besar terhadap potensi daerah yang dimiliki Buteng Tengah. Respons positif tersebut dinilai sebagai sinyal dukungan

terhadap arah pembangunan yang sedang disusun pemerintah kabupaten.

Bahkan, Gubernur Sultra menyampaikan rencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Buteng Tengah pada bulan depan guna melihat langsung potensi daerah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Salah satu agenda yang disampaikan dalam rencana kunjungan itu adalah penjauhan kawasan tiga teluk, yang menjadi salah satu ikon pariwisata Buteng Tengah, dengan agenda berkeliling menggunakan speed boat.

Azhari menambahkan, pertemuan tersebut merupakan kali ketiga dirinya berdiskusi langsung secara mendalam dengan Andi Sumangerukka, sejak yang bersangkutan masih menjaga

bat sebagai Pangdam hingga kini sebagai Gubernur Sultra.

Ia menilai, Gubernur Sultra merupakan figur pemimpin yang terbuka terhadap dialog dan menghargai argumentasi yang dibangun berdasarkan data.

"Beliau bukan tipe pemimpin yang satu arah. Kalau argumen kita logis dan datanya kuat, beliau akan mengakui dan mendukung," jelas Azhari.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buteng Tengah, guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. (*)

Ini Dia Nama 25 Pejabat Pemkot Baubau Yang Dilantik Walikota HYF, 3 OPD Masih Kosong

birokrasi dan penguatan organisasi perangkat daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kota Baubau.

Wali Kota Baubau Yusran Fahim menegaskan bahwa rotasi dan pengangkatan pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Para pejabat yang dilantik diminta untuk segera menyesuaikan diri, bekerja profesional, menjaga integritas, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Pasca pelantikan diketahui 3 OPD pejabatnya belum diisi yaitu Dinas PUPR Baubau, Kantor Bappeda Baubau, Dinas Pendidikan.

Ini nama-nama pejabat yang dilantik Wali Kota Baubau:

Pada Daftar Pejabat Eselon II Pemkot Baubau yang Dilantik:

1. La Ode Aswad, S.Sos., M.Si "Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau

2. Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Baubau

3. Sitti Munawar, S.STP., M.Si, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Baubau

4. Mohamad Tasdig, SH., M.Si, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

5. Eko Prasetya, ST., MM, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

6. Hanarudin, S.Sos., M.Si, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat

7. Yaya Wirayaman, S.STP., M.KP, Sekretaris DPRD Kota Baubau

8. Drs. Arif Basari, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Yulia Widiarti, ST., M.Si, Kepala Dinas Perikanan

10. Suarmawati, S.Si., M.Si, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM

11. Abdul Karim, S.Pd., M.Si, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

12. Drs. La Ode Muhammad Takdir, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan

13. Arlis, S.Pd., M.Pd, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

14. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Kominfo

15. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si, Kepala DP3AKB

16. Ibnu Wahid, ST., MM, Kepala

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

17. La Ode Ali Hasan, SE, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

18. Dra. Siti Amalia Abibu, M.Si, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

19. H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

20. Fanti Frida Yanti, SS., MM, Kepala DPMPTSP

21. Mohamad Amirsir Afie, S.Sos., M.Si, Kepala Satpol PP

22. Mohamat Abdurrahman, STP., M.Si, Kepala Bapperida

23. Muhammad Massad, SE., M.Si, Kepala Bapenda

24. La Ode Muslimin Hibali, SE., M.Si, Kepala Pelaksana BPBD

25. Aliman, SE., M.Si, Kepala Badan Kesbangpol. (*)

menyatakan perhatian nyata pemerintah pusat terhadap daerah.

Menurut Gubernur, dalam tradisi Kesultanan Buteng, pemberian gelar kehormatan adat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk penghargaan atas sikap, ketekunan, kebijaksanaan, serta kontribusi seseorang bagi kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penganugerahan gelar kepada Menteri Agama RI yang kembali dilakukan di Kota Baubau. Ia menilai kehadiran Menag

Pemkab Buten Akan Percepat Perbaikan Pasar Kaloko Pascakerusakan, Bupati Alvin Akawijaya Komitmen Akan Dirikan Bangunan Lebih Tahan Hadapi Cuaca Ekstrem

Pasar Kaloko sendiri dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Buten sebagai pasar sementara pascabakaran yang terjadi pada akhir Desember 2025. Ke depan, pasar ini tetap akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terus dioptimalkan.

Pemerintah daerah menilai bahwa keberlanjutan fungsi pasar harus dijaga demi menjalin stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kecil yang mengantungkan penghidupan dari aktivitas jual beli harian.

Dalam waktu dekat, koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait, termasuk pengelola pasar dan pelaksana teknis pembangunan.

Bupati juga akan menginstruksikan agar seluruh proses perbaikan mengacu pada standar konstruksi yang lebih baik, sehingga aspek keselamatan pengunjung dan pedagang dapat lebih terjamin.

"Kita tidak bisa menunda karena pasar adalah pusat aktivitas ekonomi warga. Pemerintah Kabupaten bersama pihak terkait akan berkoordinasi agar perbaikan bisa segera dilaksanakan," tegas Bupati saat berada di lokasi.

Ke depan, pemerintah daerah juga akan memperkuat peng-

wasan selama proses perbaikan berlangsung. Pengelola pasar akan diminta memastikan area pengerjaan tetap steril demi keselamatan masyarakat.

Pemasangan tanda peringatan dan pembatasan akses di sekitar titik kerusakan akan menjadi langkah yang terus diterapkan hingga proses perbaikan benar-benar rampung.

Pemerintah Kabupaten Buten berharap, setelah perbaikan selesai, para pedagang dapat kembali menjalankan aktivitas usaha dengan rasa aman dan nyaman.

Pemulihan aktivitas perdagangan di Pasar Kaloko juga diproyeksikan mampu menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat. Taklimo dan wilayah sekitarnya.

Ke depan, dialog antara pemerintah daerah dan para pedagang akan terus diperkuat. Pola komunikasi ini diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik ke depan, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan bangunan terhadap cuaca ekstrem.

Berdasarkan data BMKG, wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Buten, memiliki kelembaban udara yang tinggi, suhu udara yang stabil, dan sedikit perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau. (*)

Yusran Fahim Lantik Pejabat Baru, Wali Kota Baubau: Hilangkan Ego Sektoral, Perkuat Kolaborasi

digabungkan sehingga sebagian besar pejabat yang dilantik merupakan pengukuran jabatan.

Wali Kota Baubau menjelaskan, setelah perda baru berjalan, pemerintah daerah akan kembali melakukan evaluasi untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan daerah. Selain itu, penyesuaian juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna mempermudah koordinasi program dan kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, turut dilantik pejabat eselon II hasil job fit yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Menurut Wali Kota, mutasi dan promosi merupakan hal yang rutin dilakukan, baik untuk mengisi kekosongan jabatan maupun sebagai bentuk penyegaran organisasi.

"Kepada para pejabat

yang dilantik hari ini, agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta menjadi teladan di lingkungan kerjanya," ujar Yusran Fahim.

Ia juga menekankan

pentingnya menghadirkan energi dan semangat baru dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Memasuki tahun 2026 atau tahun kedua pelaksanaan RPJMD, Wali Kota meminta seluruh jajaran untuk tidak menunda pekerjaan dan segera beraksi.

"Hilangkan ego sektoral. Saatnya berkolaborasi dan bekerja bersama. Pemerintah akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja,

kompetensi, dan perilaku aparatur," tegasnya. (*)

antara nilai kebangsaan, keagamaan, dan kearifan budaya lokal yang terus dijaga oleh masyarakat Buten.

Prosesi adat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh daerah, antara lain Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Bupati Buten Selatan H. Muh. Adios, Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamzah Bolu, M.Sc., Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, S.T., Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara H. Mansur beserta jajaran.

Selain itu, hadir pula Pj Sekda Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., para kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau, perangkat Lembaga Adat dan Budaya Kesultanan Buten, serta undangan lainnya dari berbagai unsur masyarakat. (*)

Menag RI Nasaruddin Umar Terharu dan Kaget Terima Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buten

memiliki makna besar dan tanggung jawab moral yang berat.

"Saya sempat bertanya kepada diri sendiri, apakah saya pantas menerima gelar sebesar ini. Saya merasa mungkin belum sepenuhnya layak, namun ini adalah harapan Paduka Yang Mulia Sultan Buten. Semoga menjadi motivasi bagi saya untuk terus berbuat lebih baik bagi masyarakat, khususnya umat Islam," ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa semakin besar amanah yang diberikan kepada seseorang, maka semakin besar pula tuntutan keikhlasan dan ketulusan dalam mengabdi. Menurutnya, tanggung jawab publik harus dijalankan dengan integritas dan niat ibadah.

Nasaruddin Umar menambahkan, dirinya tidak pernah memiliki cita-cita untuk menjadi Menteri Agama, apalagi menerima gelar adat kehormatan. Ia bahkan

menunjukkan perhatian nyata pemerintah pusat terhadap daerah.

Menurut Gubernur, dalam tradisi Kesultanan Buten, pemberian gelar kehormatan adat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk penghargaan atas sikap, ketekunan, kebijaksanaan, serta kontribusi seseorang bagi kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa penganugerahan gelar kepada Menteri Agama RI yang kembali dilakukan di Kota Baubau. Ia menilai kehadiran Menag

Senin, 26 Januari 2026

BAUB AU POST

www.baubaupost.com

Ratusan Warga Luwu Utara Blokade Jalan Trans Sulawesi Tuntut Provinsi Luwu Raya Segera Direalisasikan



Laporan: Alwan

LUWU UTARA, DT-Aksi unjuk rasa ratusan warga yang memblokade Jalan Trans Sulawesi di Jembatan Baliase, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, berlangsung hingga Jumat malam (23/1/2026). Hingga berita ini diturunkan, negosiasi antara aparat kepolisian dan perwakilan massa masih terus dilakukan dan belum menghasilkan kesepakatan pembukaan akses jalan.

Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan masyarakat terkait percepatan realisasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Wilayah yang diusulkan masuk dalam provinsi baru itu mencakup Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, serta Kota Palopo.

Sejak sore hari, massa mulai memadati

ti kawasan Jembatan Baliase dan melakukan pemblokiran total terhadap jalan nasional yang menghubungkan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat bergerak.

Untuk memperkuat blokade, massa melakukan berbagai tindakan seperti menebang pohon di sekitar lokasi, membakar ban bekas, serta memasang spanduk-spanduk tuntutan di sepanjang badan jalan. Situasi tersebut membuat kendaraan tidak bisa melintas sama sekali.

Kemacetan panjang pun tidak terhindarkan. Kendaraan pribadi, truk pengangkut logistik, hingga bus antarkota terpaksa berhenti berjam-jam. Sebagian pengemudi memilih memutar arah karena antrean kendaraan di sekitar lokasi aksi.

Aksi ini juga berte-

hingga beberapa kilometer.

Kapolres Luwu Utara, AKBP Nugraha Pamungkas, menjelaskan bahwa pihak kepolisian masih mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani aksi tersebut. Menurutnya, dialog menjadi prioritas untuk menghindari eskalasi konflik.

"Kami tetap melaksanakan negosiasi dan melayani masyarakat yang melakukan unjuk rasa terkait isu lokal," ujar Nugraha dalam keterangan kepada media.

Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Luwu Utara menggerakkan sekitar 200 personel. Pengamanan juga diperkuat oleh personel Batalyon Brimob Polda Sulawesi Selatan yang disiagakan di sekitar lokasi aksi.

Aksi ini juga berte-

patan dengan momentum peringatan Hari Jadi Luwu, yang oleh sebagian masyarakat dimaknai sebagai waktu yang tepat untuk menyuarakan aspirasi tentang pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di kawasan Luwu Raya.

Meski aparat keamanan telah bersiaga sejak awal, massa tetap bertahan hingga malam hari. Api dari ban bekas dan batang kayu terus dinyalakan sebagai simbol perlawanan atas tuntutan yang mereka sajikan.

Kapolres Luwu Utara mengakui bahwa pemblokiran jalan berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Namun, pihaknya berkomitmen mencari jalan tengah agar aspirasi warga tetap tersampaikan tanpa mengorbankan kepentingan umum. (*)

Ketum Apeksi Soal Wacana Pilkada via DPRD: Biar Rakyat yang Menentukan



Ketua Umum Apeksi Eri Cahyadi merespons munculnya wacana Pilkada lewat DPRD dengan menyebut semua terserah rakyat.

Laporan: Hamid

S U R A B A - YA-Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi, merespons munculnya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Eri yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surabaya ini menegaskan segala bentuk perubahan kebijakan, termasuk soal pilkada mestinya harus mempertimbangkan betul keinginan publik sebelum memutuskan apakah mekanisme pilkada akan diubah atau tetap dipertahankan.

"Ya kita lihat rakyat ingin yang mana. Jadi semua kan dipilih rakyat nih. DPRD dipilih rakyat. Wali kota, kepala daerah dipilih rakyat. Jadi undang-undangnya seperti apa? Kita lihat keinginan rakyat. Maka sejatinya Apa yang diinginkan rakyat yang harus kita jalankan," ucapnya.

"Kita kembali kepada undang-undang dan kembali kepada rakyat. Karena kita ini undang tertingginya adalah [kepentingan] rakyat. Jadi biarkan rakyat yang menentukan," kata Eri ditemui di Komplek Pemkot Surabaya, Jumat (23/1).

Politikus PDI

Perjuangan ini mengatakan, jabatan legislatif maupun kepala daerah merupakan mandat langsung dari rakyat. Karena itu menurutnya, pemerintah semestinya mempertimbangkan betul keinginan publik sebelum memutuskan apakah mekanisme pilkada akan diubah atau tetap dipertahankan.

harus berakar pada kebutuhan dan kehendak rakyat.

"Tadi kan saya sampaikan. Dipilih rakyat itu adalah kita. DPRD dipilih rakyat. Tapi kita harus ingat apa yang diinginkan rakyat. Ya kita lihat. Rakyat ini kepengin opo," pungkasnya.

Wacana pilkada lewat DPRD muncul sejak akhir 2025 dan didukung tujuh dari delapan fraksi DPR RI. Hal itu mereka hembuskan usai menyebut mahalnya Pemilu langsung di Indonesia. Dari delapan fraksi DPR RI, hanya PDIP yang menolak wacana tersebut.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Revisi UU Pilkada tidak masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diusulkan Komisi II DPR 2026. Sehingga, wacana usul pilkada lewat DPRD tak akan dibahas dalam waktu dekat. (*)

Bahlil Respons Isu Reshuffle: Menteri Itu Pembantu Presiden

Laporan: Alwan

JAKARTA-Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat suara soal isu kocok ulang kabinet atau reshuffle yang menguat dalam beberapa waktu terakhir dan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Saat ditanya soal kans reshuffle terha-

dap kader Golkar di kabinet, Bahlil tak menjawab tegas. Dia mengatakan bahwa menteri sepenuhnya merupakan pembantu Presiden.

"Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden," kata Bahlil usai rapat dengan Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Oleh karena se-

bagai pembantu, ujar Bahlil, maka hanya Presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan. Dia menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya membantah isu reshuffle dalam waktu dekat.

Hingga saat ini, dia bilang belum ada agenda Presiden Prabowo Subianto untuk merotasi jajaran menterinya di



Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat suara soal isu kocok ulang kabinet atau reshuffle yang menguat dalam beberapa waktu terakhir dan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kabinet Merah Putih.

"Reshuffle kabi-

net? Belum, belum, belum ada," ujarnya di Kompleks Parle-

men Senayan, Jakarta, Senin (19/1).(*)

Wallacea Expeditions Usulkan Taman Nasional Baru di Sultra



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pembentukan lanskap konservasi baru seluas sekitar 6.000 kilometer persegi di Sulawesi Tenggara mengemuka dalam Konferensi Pers Presentasi Hasil Ilmiah Wallacea Expeditions yang digelar di Hotel Plaza Inn Kendari, Senin (5/1/2026). Kegiatan ini sekaligus dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk mendorong lahirnya kawasan konservasi baru yang diarahkan menjadi Taman Nasional dan Geopark UNESCO, berbasis hasil riset ilmiah lintas lembaga dan perguruan tinggi.

Sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul, perwakilan Rektor Universitas Halu Oleo, para akademisi, dosen, kepala OPD Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, Direktur Nature Volutio, serta peneliti dari berbagai kampus nasional seperti Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa kawasan pegunungan dan hutan di Sulawesi Tenggara, khususnya wilayah Tangkil, Mekongga, Matarombeo, Sambore, dan sekitarnya, memiliki peran ekologis yang sangat vital sebagai penyanga sistem hidrologi regional.

Menurutnya, kerusakan kawasan hulu berpotensi menimbulkan dampak serius bagi daerah hilir seperti Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Timur yang mengantarkan kehidupan pada aliran sungai dan kawasan rawa. "Kami sungguh berbahagia dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Penelitian ini lahir dari keringat, pengorbanan, dan dedikasi para peneliti. Walaupun tidak dibiayai pemerintah daerah, manfaat ilmiahnya luar biasa bagi masa depan Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Wagub juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor kehutanan dan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan dan penguatan konservasi berbasis lanskap.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, menegaskan bahwa meskipun kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dengan pemer-

lakukan ekspedisi ilmiah secara mandiri di wilayah Sultra. Ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai riset berskala besar, namun hasil penelitian tersebut dinilai sangat berharga.

"Kami sungguh berbahagia dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Penelitian ini lahir dari keringat, pengorbanan, dan dedikasi para peneliti. Walaupun tidak dibiayai pemerintah daerah, manfaat ilmiahnya luar biasa bagi masa depan Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Wagub juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam sektor kehutanan dan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia berharap adanya kebijakan pemerintah pusat yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan dan penguatan konservasi berbasis lanskap.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, menegaskan bahwa meskipun kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dengan pemer-

intah daerah, akademisi, dan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan saat ini telah membentuk Task Force Pengelolaan Hutan Berbasis Lanskap melalui SK Menteri dan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah yang disiapkan sebagai pilot project nasional.

Selain itu, pemerintah pusat juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan NGO, perguruan tinggi, dan mitra internasional, mengingat keterbatasan APBN dalam mengelola kawasan hutan Indonesia yang sangat luas.

Dalam aspek pembiayaan, Silverius turut menyoroti potensi skema karbon kredit dan biodiversitas kredit sebagai sumber pendanaan baru untuk konservasi yang dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi daerah.

Konferensi pers ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang publikasi hasil riset, tetapi juga menjadi pijakan awal lahirnya komitmen kolektif lintas sektor dalam menjaga kelestarian ekosistem Wallacea demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. (*)

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Oscar Unggul, menegaskan bahwa meskipun kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dengan pemer-

Wagub Sultra Hugua Tegaskan 2026 Jadi Tahun Pengabdian ASN



Laporan: Lisna

SULTRA, BP-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum penguatan pengabdian dan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penegasan itu disampaikan saat ia memimpin Apel Gabungan ASN di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (5/1/2026).

Apel tersebut diikuti ribuan ASN dari berbagai instansi, mulai dari Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, staf ahli gubernur, para asisten Sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala biro, hingga pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemprov Sultra.

Dalam arahannya, Hugua menekankan bahwa tantangan pemerintahan ke depan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan lama. Menurutnya, ASN dituntut untuk beradaptasi, membangun inovasi, dan bekerja dengan cara-cara baru agar pelayanan publik semakin berkualitas.

Ia juga mengajak seluruh ASN untuk memperkuat kebersamaan dan koneksi, dengan menggeser pola pikir individualistik menuju semangat kolektif. "Kita harus bergerak dari semangat 'saya' menjadi 'kami' demi pelayanan publik yang lebih

baik," ujarnya.

Selain aspek kinerja, Wagub mengingatkan pentingnya keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas. Ia mendorong ASN untuk meningkatkan kualitas ibadah, menjaga hubungan harmonis dengan sesama, serta memperhatikan relasi dengan lingkungan dan alam.

Pada kesempatan itu, Hugua turut menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh OPD Pemprov Sultra dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara selama tahun 2025. Ia menyebut kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan di 17 daerah telah menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas pembangunan.

"Hari ini kita masuki minggu pertama tahun 2026. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota atas pengabdian selama 2025," kata Hugua.

Ia mengakui bahwa tahun 2025 diwarnai berbagai dinamika dan tantangan, namun juga meninggalkan capaian yang patut dibanggakan.

Salah satu indikatornya adalah realisasi anggaran daerah yang mencapai 88,64 persen.

"Alhamdulillah, capaian tersebut adalah prestasi, meskipun kami juga menyadari masih ada kekurangan dan kami mohon maaf atas hal itu," ungkapnya.

Wagub juga meny-

tinggung upaya efisiensi yang dilakukan sepanjang tahun lalu. Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang sarat dengan nilai pengabdian dan keikhlasan ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, Hugua menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sultra dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan daya saing daerah, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia menyebut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi 2025 yang diumumkan pada Januari hingga Maret menunjukkan capaian yang tergolong baik.

Melihat kondisi tersebut, ia optimistis kinerja pemerintahan daerah berada dalam posisi yang cukup solid. Karena itu, seluruh ASN diminta terus memperbaiki kinerja agar pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

"Saya melihat semangat di mata saudara-saudara. Itu pertanda bahwa 2026 harus kita jadikan sebagai tahun penuh pengabdian," tegasnya.

Menutup amanatnya, Hugua mengingatkan ASN agar tidak menunda pekerjaan dan pengabdian. Menurutnya, masa depan daerah ditentukan oleh kualitas kerja hari ini, bukan sekadar rencana esok hari.

"Jangan menunggu besok. Hari ini kita jalani, hari ini kita kerjakan, dan hari ini kita berikan yang terbaik untuk Sulawesi Tenggara," pungkasnya. (*)

HUT Konut ke-19, Gubernur Andi Sumangerukka Soroti Tantangan Kemiskinan hingga Krisis Energi di Konut

KONUT, BP-Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Konawe Utara menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI

(Purn) Andi Sumanegarukka, menegaskan hal tersebut saat menghadiri upacara peringatan HUT ke-19 Konawe Utara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Konawe Utara, Jumat (2/1/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan hari jadi daerah seharusnya

tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus dijadikan ruang refleksi untuk menilai sejauh mana perjalanan pembangunan sejak Konawe Utara resmi berdiri sebagai daerah otonomi baru.

Ia menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan selama 19 tahun terakhir patut disyukuri

bersama oleh seluruh masyarakat. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut juga harus diimbangi dengan keberanian melakukan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang masih dihadapi daerah.

Sejumlah tantangan strategis pun disoroti, mulai dari persoalan kemiskinan,

pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan dan energi, kerusakan lingkungan, hingga pentingnya peningkatan profesionalitas serta integritas aparatur pemerintahan.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Konawe Utara. Ia me-

nilai bahwa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal harus tetap menjadi fondasi dalam setiap proses pembangunan agar berjalan berkelanjutan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan sinergi kuat antara pemerintah

daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.

"Peringatan HUT ini harus memperkuat semangat kebersamaan, memperkokoh komitmen, dan mempererat kolaborasi agar Konawe Utara semakin maju dan sejahtera," tegas Andi Sumangerukka. (MI)

Pemda Buton Tengah Perkuat Sinergi Sukseskan Program MBG



BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong sinergi lintas sektor serta pemanfaatan potensi pangan lokal sebagai basis utama ketahanan pangan daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 24 Januari 2026, bertempat di Aula Pancana Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah.

Sosialisasi dipandu oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah, Drs. Andy Nursin, M.Si. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Kepala Satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi (Kasatpel SPPG), mitra pelaksana, SPPI, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, hingga Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah.

Dalam pemaparannya, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Buton Tengah, Sela Wati Tomia, S.M., M.M., menekankan pentingnya pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber utama bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, strategi tersebut menjadi kunci keberlanjutan Program MBG sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan bahan pangan lokal tidak hanya berdampak pada kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi petani dan pelaku usaha pangan di Buton Tengah.

Dukungan terhadap pelaksanaan program juga datang dari unsur TNI. Perwakilan Kodim Buton, Dandramil 1413-08/Gu Kapten Inf. Arifin, menyampaikan bahwa pihaknya menjalankan sistem pelaporan kegiatan SPPG secara rutin dan berjenjang dari aspek territorial.

Mekanisme tersebut bertujuan memastikan pengawasan serta pengendalian program berjalan secara terukur di wilayah.

Sementara itu, dari unsur kepolisian, Wakil Kepala Polres Buton Tengah, Kompol Bagio, memaparkan peran strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Peran tersebut mencakup pengamanan distribusi, pengadaan bahan pangan, hingga mendukung kelancaran aktivitas produksi pangan masyarakat.

Malalui forum tersebut, para peserta juga merumuskan sejumlah rekomendasi

strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG di daerah. Rekomendasi itu meliputi pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan baku dapur SPPG, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pembukaan lahan pertanian baru, serta pendampingan teknis oleh OPD terkait.

Selain itu, peserta juga mendorong adanya dukungan regulasi dari pemerintah daerah dalam pengaturan suplai dan pengadaan pangan, serta pemberdayaan UMKM lokal agar dapat terlibat aktif sebagai penyedia bahan baku bagi dapur SPPG.

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap, melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi serta kesejahteraan masyarakat. (*)

tidak terdaftar.

"Saya tegaskan, tidak boleh ada dapur ilegal yang tidak terdaftar di sistem SPPG. Kita pernah mengalami satu kasus keracunan di Awainulu, dan setelah itu tidak ada lagi. Ke depan, kualitas dan pengawasan harus lebih ketat," ujar Alvin.

Selain isu lingkungan, Bupati Alvin juga menyoroti kesiapan daerahnya dalam mendukung dua program strategis nasional lainnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut, Kabupaten Buton termasuk

daerah yang lebih awal menjalankan kedua program tersebut di wilayah Kepulauan Buton.

Untuk program MBG, Pemkab Buton menargetkan pembukaan 10 dapur layanan pada tahun 2026. Alvin mengakui, target tersebut sebelumnya belum sepenuhnya tercapai, namun pihaknya kini memperkuat sistem pelaksanaan, termasuk dengan menetapkan dapur yang

ia bahkan menyebut, laporan dari Komandan Kodim setempat menunjukkan bahwa Buton termasuk

Pemkab Buton Sambut Kajari Baru Sterry Fandy Andih, Siap Bangun Kolaborasi Daerah



kejaksaan dinilai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di Buton.

Dalam sambutannya, Sterry Fandy Andih menyampaikan harapan agar dirinya dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat Buton. Ia juga menegaskan ke siapan untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh unsur Forkopimda serta Pemerintah Kabupaten Buton.

Sterry mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara merupakan provinsi ketiga dalam perjalanan pengabdianya. Sebelumnya, ia bertugas selama kurang lebih 10 tahun di Bali dan 10 tahun di Sulawesi Utara. Pengalaman lintas daerah tersebut menjadi bekal dalam menjalankan tugas barunya.

Sementara itu, pejabat Kajari Buton sebelumnya, Gunawan Wisnu Murdiyanto, S.H., M.H., kini mengembangkan aman baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Perantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari dinamika organisasi kejaksaan.

Bupati Buton, Alvin Akwijaya Putra, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Kajari Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado. Pengalamannya panjangnya di dunia

pengembangan ekonomi lokal menjadikannya kunci utama menjaga stabilitas bangsa. Oleh karena itu, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah sekaligus pilar kemandirian nasional.

"Konflik yang terjadi di berbagai tempat sering kali dipicu persoalan ekonomi. Presiden mendorong program-program ini untuk menggerakkan ekonomi lokal. Politik pangan menjadi sangat penting bagi kemandirian nasional."

Akmal menilai, penguatan ekonomi lokal menjadi kunci utama menjaga stabilitas bangsa. Oleh karena itu, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah sekaligus pilar kemandirian nasional.

"Menanam satu pohon satu siswa adalah bentuk nyata cinta tanah air, tanggung jawab, dan produktivitas. Ini bisa menjadi fondasi kuat bagi masa depan bangsa," kata

Hadiri Rakornas, Alvin Tegaskan Komitmen Dukung Program Presiden, Siapkan Perup Satu Siswa

Satu Pohon

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh Program Prioritas Presiden dan Asta Cita melalui penguatan kebijakan daerah, salah satunya dengan menyiapkan Peraturan Bupati (Perup) tentang gerakan satu siswa menanam satu pohon.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akwijaya Putra, SH usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, Kamis (15/1/2026), di Jakarta.

Menurut Alvin, gagasan gerakan satu siswa satu pohon merupakan langkah strategis untuk membangun kesadaran lingkungan

sejak dulu sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan karakter generasi muda.

Program tersebut juga dinilai relevan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Buton akan segera membahas konsep kebijakan tersebut bersama pemangku kepentingan sebelum ditetapkan secara resmi melalui Perup. Setiap sekolah nantinya akan didorong agar mewajibkan peserta didik menanam dan merawat minimal satu pohon.

"Gagasan ini sangat baik dan sejalan dengan kondisi hari ini. Kami akan menindaklanjutinya dengan serius. Setiap sekolah minimal satu murid satu pohon. Ini bukan

hanya soal lingkungan, tapi juga pendidikan karakter," ujar Alvin.

Selain isu lingkungan, Bupati Alvin juga menyoroti kesiapan daerahnya dalam mendukung dua program strategis nasional lainnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut, Kabupaten Buton termasuk

daerah yang lebih awal menjalankan kedua program tersebut di wilayah Kepulauan Buton.

Untuk program MBG, Pemkab Buton menargetkan pembukaan 10 dapur layanan pada tahun 2026. Alvin mengakui, target tersebut sebelumnya belum sepenuhnya tercapai, namun pihaknya kini memperkuat sistem pelaksanaan, termasuk dengan menetapkan dapur yang

ia bahkan menyebut, laporan dari Komandan Kodim setempat menunjukkan bahwa Buton termasuk

Akmal.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan gerakan menanam pohon melalui regulasi kepala daerah, karena dinilai mampu membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Menanam satu pohon satu siswa adalah bentuk nyata cinta tanah air, tanggung jawab, dan produktivitas. Ini bisa menjadi fondasi kuat bagi masa depan bangsa," kata

PENDIDIKAN & KESEHATAN 5

www.baubaupost.com

BAUBAU POST

Senin, 26 Januari 2026

Ketua STAI Baubau Pantau Langsung Pelaksanaan UAS Ganjil Yang Ratusan Mahasiswa Tahun Akademik 2025/2026



Laporan: Firman

BAUBAU, DT-Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kota Baubau resmi menggelar Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang dipusatkan di kampus STAI, Jalan R.A Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Ujian tersebut diikuti mahasiswa dari tiga program studi, yakni Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Pendidikan Agama Islam (PAI), dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pelaksanaan UAS berlangsung selama tiga hari, mulai 22 hingga 25 Januari

2026.

Ketua Panitia UAS, Muhammad Akbar, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti ujian yang menjadi tolok ukur capaian pembelajaran selama satu semester.

"Pelaksanaan ujian tahun ini telah diperlakukan secara matang guna menjamin kualitas dan integritas akademik," ujar Akbar saat diwawancara awak media, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan ujian dibagi ke dalam beberapa sesi untuk menjaga kondisivitas ruangan serta kenyamanan mahasiswa da-

lam mengerjakan soal.

"Ujian ini bukan sekadar mengejar nilai angka, tetapi lebih menekankan pada kedisiplinan serta sejauh mana mahasiswa mampu menyerap dan mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dosen selama perkuliahan," katanya.

Sementara itu, Ketua STAI Baubau, La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Pd., M.M., turut memantau langsung jalannya ujian serta memberikan arahan kepada civitas akademika.

Menurutnya, ujian semester merupakan bagian dari komitmen kampus dalam mencetak lulusan yang kom-

peten di bidangnya.

"Ujian semester ini adalah instrumen penting dalam evaluasi mutu pendidikan. Kami terus berupaya meningkatkan standar akademik agar lulusan STAI Baubau memiliki daya saing yang kuat, baik secara intelektual maupun spiritual," jelasnya.

Ia juga berharap mahasiswa dapat memanfaatkan momentum ujian untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

"Keberhasilan pelaksanaan ujian ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi peningkatan akreditasi institusi dan pengembangan program studi ke depan," tutupnya. (*)

Tarik Dokter ke Daerah, Menkes Siapkan Insentif hingga Rp30 Juta per Bulan



SURABAYA-Pemerintah menyiapkan insentif tambahan hingga Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah terpencil sebagai langkah percepatan pemerataan layanan kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kebijakan ini mulai diterapkan Januari 2026. Insentif diberikan di luar gaji, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter spesialis di daerah dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.

"Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan," kata

Budi.

Kebijakan ini menarik minat para spesialis yang selama ini kekurangan bertugas di daerah terpencil sebagai langkah percepatan pemerataan layanan kesehatan.

belum mencukupi kebutuhan nasional.

Untuk mempercepat pemenuhan tenaga medis, pemerintah juga mendorong program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

"Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun.

Kita percepat melalui fellowship satu tahun," jelasnya.

Ia menegaskan pemilihan dokter spesialis harus dibarengi dengan ketersediaan alat kesehatan agar layanan dapat berjalan optimal.

"Percuma kita kirim dokter spesialis kalau alatnya tidak ada. Jadi alat dan SDM harus jalan bareng," tegas Budi.(K1)

Setahun Sekali Seumur Hidup, Presiden Jamin Cek Kesehatan Gratis bagi Seluruh Warga

Laporan: Mashuri

DAVOS-Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat modal manusia melalui sektor kesehatan, dengan menjamin layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh warga Indonesia secara rutin setiap tahun sepanjang hidup.

Dalam pidatonya di World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden menyampaikan bahwa hingga saat ini lebih dari 70 juta masyarakat telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Program ini dirancang sebagai hak dasar

masyarakat dan akan terus diperluas cakupannya hingga mencakup seluruh populasi, dari anak-anak hingga orang dewasa.

Presiden Prabowo menekankan kebijakan CKG bukan merupakan program populis, melainkan langkah rational untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui deteksi dini penyakit.

"Ini adalah program peningkatan produktivitas. Para ahli saya menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kita akan menghemat miliaran dolar AS," tegas Presiden Prabowo.

Seiring dengan penguatan skrining kesehatan, pemerintah juga mengakselerasi pemerataan akses kefarmasian melalui

pembangunan 83.000 apotek desa yang menyediakan obat generik bersubsidi langsung kepada mas-

yarakat.

Melalui penguatan modal manusia yang sehat dan berkualitas, pemerintah optimis

memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Baubau Post
Harian Pagi
KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Amat Jr
Korlip: Noval
Redaktur: Kasrun, Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Ja-
maluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Kepala Biro Wakatobi: Rismen
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: Rahim
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana)

Blok K Nomor 01

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana)
Blok K Nomor 01

Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Senin, 26 Januari 2026

BAUB AU POST

www.baubaupost.com

KRYD Polsek Kokalukuna Sasar Bypass hingga Bukit Wantiro, Pemuda Bermiras Dibubarkan, Malam Minggu Tetap Aman



Laporan: Ardi

B A U B A U , BP-Situasi keamanan di wilayah hukum Polsek Kokalukuna terpantau kondusif hingga Sabtu malam, 24 Januari 2026, setelah aparat kepolisian mengintensifkan Patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik rawan keramaian.

Kegiatan patroli mobile tersebut berlangsung hingga pukul 23.00 WITA dan mencakup sejumlah wilayah, mulai dari Jalur Bypass, Kelurahan Lakologou, Kelurahan Waruruma, hingga kawasan wisata Bukit Wantiro yang dikenal sebagai salah satu lokasi favorit masyarakat pada malam akhir pekan.

Kapolsek Kokalukuna, Iptu Rahmansyah, S.H., menjelaskan bahwa patroli intensif ini merupakan langkah preventif guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan

dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama pada malam Minggu yang kerap diwarnai aktivitas pemuda hingga larut malam.

Menurutnya, pendekatan pencegahan lebih dikedepankan agar masyarakat merasa aman tanpa harus muncul tindakan represif. Oleh karena itu, personel diarahkan untuk tetap tegas namun mengedepankan sikap humanis di lapangan.

Dalam pelaksanaan patroli di sepanjang Jalur Bypass, petugas mendapati sekelompok pemuda yang tengah berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras di ruang publik. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lokasi.

Petugas melakukan penggeledahan badan dan kendaraan guna memastikan tidak ada senjata tajam maupun barang terlarang lain yang berpotensi membahayakan keselamatan

matan umum. Setelah dipastikan aman, sisa minuman keras diamankan dan para pemuda dibubarkan secara persuasif.

"Kami tidak memberikan ruang bagi aktivitas yang mengganggu ketenangan warga. Saat anggota menemukan pemuda nongkrong sambil miras, sisa minumannya kami amankan dan mereka diberikan edukasi agar segera pulang ke rumah masing-masing," ujar Iptu Rahmansyah.

Ia menegaskan bahwa konsumsi miras di tempat umum kerap menjadi pemicu utama terjadinya gesekan antarindividu, perkelahian, hingga tindak kriminalitas di jalanan.

Selain menyisir kawasan Bypass dan Lakologou, patroli juga menyambangi Kelurahan Waruruma dan kawasan wisata Bukit Wantiro. Di lokasi tersebut, petugas memberikan imbauan kepada para pen-

gunjung dan pemuda agar tidak beraktivitas hingga larut malam demi menghindari risiko kejadian yang tidak diinginkan.

Kapolsek menambahkan, patroli KRYD akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus untuk mencegah potensi balapan liar, tawuran, serta aksi premanisme.

"Harapan kami se-derhana, masyarakat bisa beristirahat dengan tenang dan merasa aman di lingkungannya," tambahnya.

Hasil patroli menunjukkan kondisi wilayah Kokalukuna relatif aman dan terkendali. Aktivitas di sejumlah titik keramaian mulai berkurang menjelang malam, sementara pedagang dan pengunjung membubarkan diri secara tertib di bawah pengawasan petugas kepolisian. (*)

Polisi Sisir Katobengke hingga Wajo dalam Kegiatan KRYD, Kapolsek Murhum Ipda Harris Eka Putra Pimpin Langsung Patroli Kamtibmas

Laporan: Amran

B A U B A U , BP-Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Murhum terpantau kondusif hingga Sabtu malam, 24 Januari 2026, setelah jajaran kepolisian melaksanakan Patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama kurang lebih dua setengah jam.



KPK Usai Periksa Dito: Pembagian Kuota Haji Melenceng Tujuan



KPK sebut korupsi kuota haji makin kuat usai mereka periksa mantan Menpora, Dito Ariotedjo.

Laporan: Hadi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengantongi bukti yang semakin kuat dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pemberian kuota haji oleh mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada periode 2023-2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penguatan bukti itu diperoleh penyidik melalui pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pada Jumat (23/1).

Menurut Budi, keterangan Dito menguatkan dugaan bahwa diskresi yang dieluarkan Kementerian Agama terkait pembagian kuota haji telah menyimpang dari tujuan awal.

"Ini menguatkan

Kegiatan patroli tersebut berakhir sekitar pukul 23.30 WITA tanpa ditemukan kejadian menonjol.

Berdasarkan laporan petugas di lapangan, seluruh titik yang dipantau berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Kapolsek Murhum, Ipda Harris Eka Putra, S.H., menegaskan bahwa patroli rutin merupakan bagian dari strategi preventif kepolisian untuk mencegah potensi gangguan keamanan, khususnya pada malam akhir pekan yang dinilai rawan.

Ia menjelaskan, fokus patroli diarahkan pada pencegahan berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari konsumsi minuman keras, aksi balapan liar, hingga potensi tawuran antarkelompok remaja.

"Kami mengedepankan pendekatan pencegahan. Anggota di lapangan memberikan edukasi langsung kepada para remaja agar tidak terjerumus dalam aktivitas yang berisiko merugikan

bahwa diskresi pembagian kuota yang dilakukan oleh Kemenag melenceng dari semangat awal dalam pembahasan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (24/1).

Budi menjelaskan Dito dinilai mampu memberikan keterangan penting mengenai asal-usul penambahan kuota haji. Hal itu lanjut Dito turut mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kunjungan ke Arab Saudi.

"Karena memang kami melihat Pak Dito bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Pada saat itu, Pak Dito berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan Pemerintah Indonesia," katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetap-

diri sendiri maupun orang lain," kata Ipda Harris Eka Putra.

Kegiatan patroli tersebut diawali dengan apel kesiapan personel yang dilaksanakan di Mapolsek Murhum pada pukul 21.00 WITA. Apel dipimpin langsung oleh Kapolsek sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan anggota sebelum diterjunkan ke lapangan.

Setelah apel, personel bergerak melakukan penyisiran ke sejumlah wilayah yang masuk dalam kategori rawan gangguan kamtibmas, antara lain Kelurahan Katobengke, Lamangga, Tanganapada, hingga Kelurahan Wajo.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas mendapati sekelompok remaja yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan apabila tidak segera diantisipasi.

Petugas kemudian memberikan imbauan secara humanis agar para remaja tidak mengonsumsi minu-

man keras serta segera membubarkan diri untuk mencegah potensi terjadinya konflik, tawuran, maupun tindakan kriminal lainnya.

Kapolsek Murhum juga mengingatkan bahwa keberhasilan menjaga keamanan lingkungan tidak hanya bergantung pada peran kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Ia mengimbau warga untuk segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar.

Menurutnya, sinergi antara aparat dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif secara berkelanjutan.

Dengan berakhinya patroli KRYD tersebut, Polsek Murhum memastikan bahwa komitmen menjaga keamanan wilayah akan terus dilakukan secara konsisten, terutama pada waktu-waktu rawan seperti malam Minggu. (*)

Kwarcab Baubau Rumuskan Arah Baru Gerakan Pramuka 2026, Fokus Karakter dan Kompetensi Digital



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Baubau menargetkan lahirnya generasi muda yang berkarakter kuat, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif berbasis digital. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sidang Paripurna Cabang (Sidparcab) Tahun 2026 yang digelar di Aula DP3A Kota Baubau, Minggu (25/1/2026).

Forum strategis tahunan ini menjadi ruang konsolidasi Dewan Kerja Pramuka untuk merumuskan arah kebijakan organisasi satu tahun ke depan. Sidparcab 2026 mengusung tema "Satukan Tekad, Mantapkan Langkah, Wujudkan Pramuka Berkualitas" dan diikuti oleh perwakilan Dewan Kerja Ranting (DKR) serta unsur Dewan Saka se-Kota Baubau.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Pengembangan Anggota Dewasa Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Baubau, Kakak Drs. M.Z. Tamsir Tamim, M.Si, yang

hadir mewakili Ketua Kwarcab.

Dalam sambutannya, Kakak Tamsir menekankan bahwa tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari degradasi moral hingga dampak negatif teknologi digital. Karena itu, Pramuka dituntut tampil sebagai garda terdepan dalam pembinaan karakter dan penguatan kapasitas generasi muda.

Ia menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mutlak, terutama untuk menangkal berbagai persoalan sosial seperti bullying, penyalahgunaan narkoba, dan maraknya praktik judi online di kalangan remaja.

Selain penguatan karakter, Pramuka Baubau juga diarahkan agar mampu mengambil peran dalam mendukung visi pembangunan daerah sebagai hub maritim di Sulawesi.

Menurutnya, program kepramukaan harus terintegrasi dengan agenda strategis pemerintah daerah. Sebagai bentuk konkret, Kwarcab menitipkan tiga fokus utama untuk dirumuskan dalam program

kerja Dewan Kerja Pertama, penguatan karakter kebangsaan dengan menjadikan Gugus Depan sebagai zona anti-bullying dan mengimplementasikan nilai-nilai Dasa Darma dalam kehidupan nyata.

Kedua, peningkatan kompetensi digital dan kewirausahaan melalui pengembangan program coding, digital marketing, serta produksi konten positif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kalangan Pramuka.

Ketiga, penguatan sinergi lintas sektor dengan berbagai instansi seperti Dispora, Dinas Pendidikan, BNN, serta komunitas kreatif melalui semangat kolaborasi bertajuk "Kerja Bersama untuk Pembangunan Ketahanan Bangsa".

Kakak Tamsir juga menyoroti keberhasilan Pramuka Baubau sepanjang 2025, salah satunya melalui kegiatan Kemah Bakti di Lakologou yang dinilai mampu mengubah lahan tidur menjadi area produktif. Capaian tersebut disebut sebagai bukti bahwa Pramuka mampu menghadirkan solusi nyata di tengah mas-

yarakan.

Pada kesempatan itu, Kwarcab Baubau turut menetapkan target strategis berupa penguatan program Gugus Depan Unggul serta pencapaian Pramuka Garuda. Kakak menargetkan sedikitnya 100 Pramuka Penegak dan Pandega dapat dilantik sebagai Pramuka Garuda pada peringatan HUT Gerakan Pramuka ke-65 bulan Agustus mendatang, ujarnya.

Sidparcab 2026 dihadiri sejumlah pimpinan Kwarcab Baubau, antara lain Kakak Fanti Fridayanti, S.SM, MA (Waka Pengembangan Anggota Muda), Kakak Hj. Ratna, S.Pd., M.Pd (Waka Usaha Dana dan Sarana Prasarana), serta Kakak Drs. Sam sul Bahri, M.Si (Waka Humas, Informasi, dan Komunikasi).

Peserta sidang terdiri atas 16 perwakilan Dewan Kerja Ranting (DKR) dari delapan kecamatan, yakni Wolio, Murhum, Batupoaro, Betoambari, Kokalukuna, Bungi, Lea-Lea, dan Sorawolio. Selain itu, turut hadir delapan peninjau dari unsur Dewan Saka Bahari, Bakti Husada, Bhayangkara, dan Kencana. (*)

dengan prosesi pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi beroperasinya layanan penjualan dan servis kendaraan Daihatsu di Kota Baubau.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua DPRD Kota Baubau Ardin, ST, Sekda Kabupaten Buton Selatan La Ode Harwanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Baubau, serta manajer-

men pusat PT Makassar Raya Motor.

Dalam sambutannya, La Ode Darus Salam menyampaikan apresiasi atas kehadiran PT MRM di Baubau. Ia menilai kehadiran dealer ini menjadi simbol kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Baubau sebagai kota penghubung utama di kawasan Kepulauan Buton.

"Kehadiran dealer ini bukan sekadar unit bisnis baru, tetapi bukti bahwa Baubau ada-

lah magnet investasi. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif bagi dunia usaha," ujarnya.

Lebih jauh, Sekda menjelaskan bahwa operasional PT MRM diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan perputaran uang di masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain aspek

Baubau Jadi Tuan Rumah Konsolidasi Program Kemenag Sultra 2026



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Baubau pada Kamis, 26 Januari 2026, menjadi forum strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan dan program kerja Kemenag di daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri Agama RI Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA, Ketua DPRD Sultra, Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE, Bupati Buton Selatan H. Muh. Adios, serta Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamzah Bolu, M.Sc. Kehadiran para pejabat pusat dan daerah ini menegaskan pentingnya Rakerwil sebagai ruang konsolidasi kebijakan sebagai momentum strategis untuk memaksimalkan kebijakan dan program kerja Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan umat dan masyarakat

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menggaskan bahwa Rakerwil Kemenag Sultra 2026 merupakan momen strategis untuk memaksimalkan kebijakan dan program kerja Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan umat dan masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Gubernur menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, sehingga menuntut perencanaan program yang lebih visioner, adaptif, dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, peran Kementerian Agama dinilai sangat strategis dalam membangun fondasi sosial dan spiritual masyarakat.

Menurut H. Mansur, delapan program prioritas tersebut harus diterjemahkan dalam langkah konkret agar Kemenag Sultra

mampu bergerak lebih lincah dan adaptif. Hal ini diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan umat, baik di sektor keagamaan maupun pendidikan.

Ia juga menambahkan bahwa Kemenag Sultra terus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan berbagai lembaga di luar Kementerian Agama. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar organisasi semakin terbuka terhadap masukan serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur berharap Kemenag Sultra beserta seluruh satuan kerja di 17 kabupaten dan kota terus memperkuat peran sebagai bagian penting dari komponen pembangunan daerah. Pembinaan aparatur dan penataan organisasi, kata dia, harus dilandasi komitmen kerja profesional.

"Dengan profesionalisme dan komitmen kuat, program-program Kemenag dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Rakerwil Kemenag Sultra 2026 di Baubau pun diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga menjadi titik tolak penguatan layanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Ia mengapresiasi tema Rakerwil Kemenag Sultra 2026 yang merujuk pada hasil Rakernas Kemenag RI, yakni mempersiapkan umat masa depan. Tema tersebut

dinilai relevan dengan kebutuhan zaman dan menjadi landasan penting dalam penyusunan program pembangunan keagamaan di daerah.

Andi Sumangerukka menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, serta pemahaman agama yang relevan bagi generasi muda harus menjadi fokus utama. Menurutnya, generasi muda membutuhkan pendekatan keagamaan yang kontekstual dan selaras dengan dinamika sosial.

Lebih lanjut, Gubernur berharap Kemenag Sultra beserta seluruh satuan kerja di 17 kabupaten dan kota terus memperkuat peran sebagai bagian penting dari komponen pembangunan daerah. Pembinaan aparatur dan penataan organisasi, kata dia, harus dilandasi komitmen kerja profesional.

"Dengan profesionalisme dan komitmen kuat, program-program Kemenag dapat berjalan optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Rakerwil Kemenag Sultra 2026 di Baubau pun diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi dan perencanaan, tetapi juga menjadi titik tolak penguatan layanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Ia mengapresiasi tema Rakerwil Kemenag Sultra 2026 yang merujuk pada hasil Rakernas Kemenag RI, yakni mempersiapkan umat masa depan. Tema tersebut

Pemkot Baubau Resmikan Dealer Daihatsu PT Makassar Raya Moto, Investor Kian Percaya

BAAU, BP-Peresmian Dealer Daihatsu PT Makassar Raya Motor (MRM) Cabang Baubau menjadi penanda semakin menguatnya iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Baubau. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Bidang Pengembangan Anggota Dewasa Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Baubau, Kakak Drs. M.Z. Tamsir Tamim, M.Si, yang

dengan prosesi pengguntingan pita serta penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi beroperasinya layanan penjualan dan servis kendaraan Daihatsu di Kota Baubau.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua DPRD Kota Baubau Ardin, ST, Sekda Kabupaten Buton Selatan La Ode Harwanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kota Baubau, serta manajer-

men pusat PT Makassar Raya Motor.

Dalam sambutannya, La Ode Darus Salam menyampaikan apresiasi atas kehadiran PT MRM di Baubau. Ia menilai kehadiran dealer ini menjadi simbol kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi Baubau sebagai kota penghubung utama di kawasan Kepulauan Buton.

"Kehadiran dealer ini bukan sekadar unit bisnis baru, tetapi bukti bahwa Baubau ada-

lah magnet investasi. Pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif bagi dunia usaha," ujarnya.

Lebih jauh, Sekda menjelaskan bahwa operasional PT MRM diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, terutama melalui peningkatan perputaran uang di masyarakat serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain aspek

ekonomi, kehadiran dealer tersebut juga dinilai strategis dari sisi sosial. Pemerintah Kota Baubau berharap manajemen PT MRM dapat memprioritaskan putra-putri daerah dalam perekrutan tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal.

Dari sisi pelayanan publik, keberadaan dealer Daihatsu di Baubau akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pembelian kendaraan dan servis purna jual tanpa harus bepergian ke luar daerah.

Pemerintah Kota Baubau, lanjut La Ode Darus Salam, berharap kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dapat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suasana peresmian berlangsung khidmat namun hangat. Momen tersebut semakin cair ketika Sekda Kota Baubau menyam-